



# LAPORAN TAHUNAN PPID PELAKSANA BPSDMP

2024



# DAFTAR ISI

<b>03</b>	<b>Tentang PPID Pelaksana BPSDMP</b>
<b>04</b>	<b>Regulasi PPID</b>
<b>05</b>	<b>Struktur PPID Pelaksana BPSDMP</b>
<b>06</b>	<b>Capaian PPID Pelaksana</b>
<b>07</b>	<b>Kegiatan Internal</b>
<b>08</b>	<b>Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik</b>
<b>09</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>
<b>10</b>	<b>Kesimpulan, Evaluasi dan Saran</b>



**Kepala BPSDMP**  
PPID Pelaksana

---

## PPID PELAKSANA BPSDMP

PPID Pelaksana BPSDMP dibentuk sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan PM Perhubungan No. 46 Tahun 2018. Dengan menjunjung nilai PROPRESTASI (Problem Solver, Responsive, Oriented to Goal, Profesional, Reform, Ethic, Sustainable, Transform, Attitude, Standar Global, dan Integrity), BPSDMP berupaya menghadirkan layanan informasi yang profesional, transparan, dan akuntabel guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.



Dengan keterbukaan informasi, BPSDMP melangkah menuju pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan terpercaya



**Sekretaris BPSDMP**  
Manager Informasi

---



# REGULASI PPID

## PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Kementerian Perhubungan terkait Keterbukaan Informasi Publik ;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 593 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 591 Tahun 2023 Tentang Informasi yang Dikecualikan.





# CAPAIAN PPID PELAKSANA

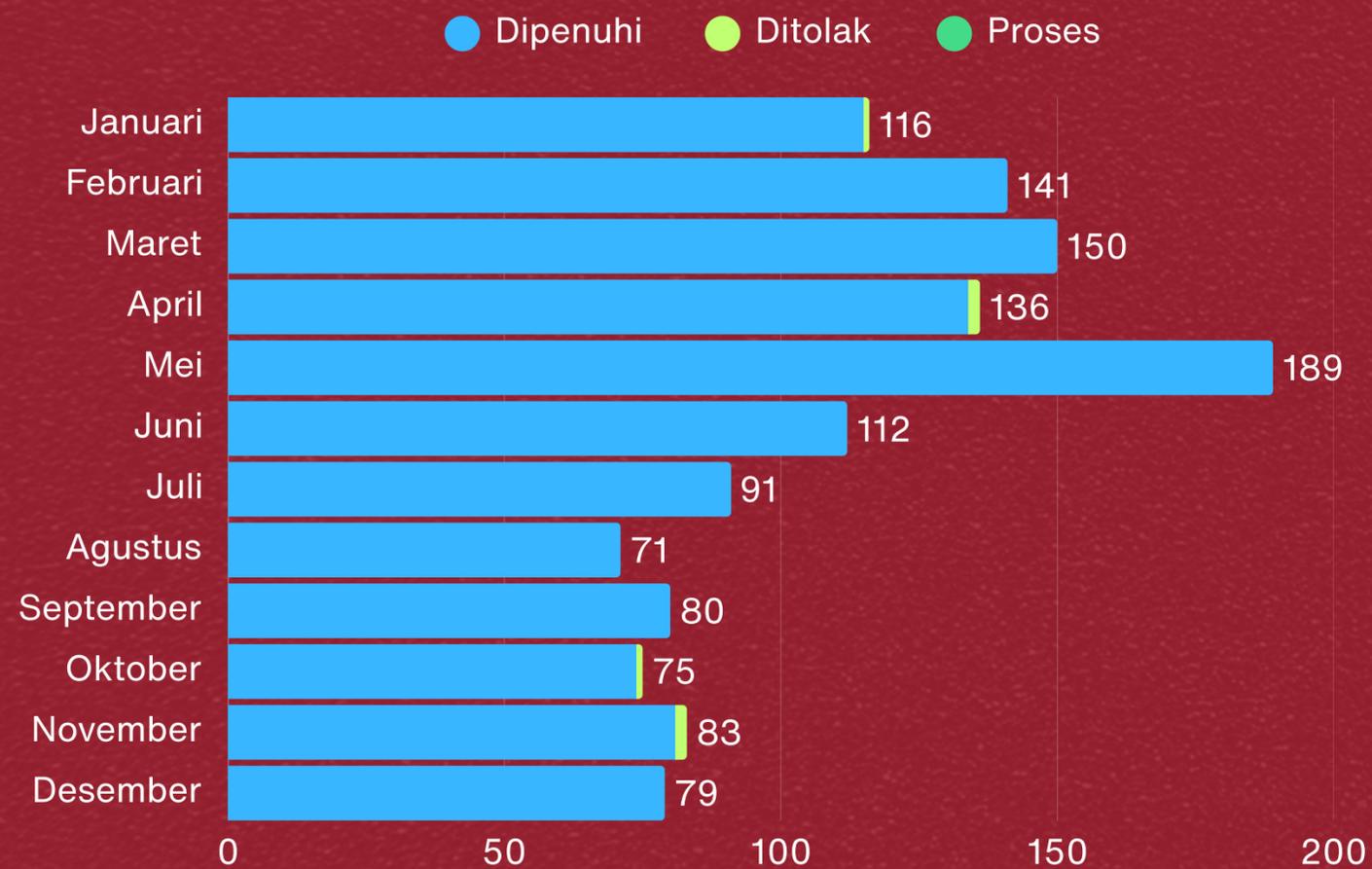
Pada tahun 2024, PPID Pelaksana BPSDMP kembali meraih predikat “Informatif” pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pencapaian ini menjadi bukti nyata konsistensi BPSDMP dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang profesional. Keberhasilan tersebut juga mempertegas komitmen BPSDMP untuk terus menjunjung tinggi nilai PROPRESTASI dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas bagi masyarakat.







# REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



Pada bulan Januari, terdapat 1 (satu) Permintaan Informasi yang ditolak, karena Permintaan data alumni Pasis I, II, ETO dan ETR (3 Periode Diklat) termasuk DIK mengacu pada Pasal 17h UU KIP

Pada bulan April, terdapat 2 (dua) Permintaan Informasi yang ditolak, karena Permintaan informasi mengenai data peserta kegiatan diklat (termasuk pada DIK karena mengacu pada UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5)

Pada bulan Oktober, terdapat 1 (satu) Permintaan Informasi yang ditolak, karena Permintaan informasi mengenai data peserta kegiatan workshop atau bimtek di BPPTD Mempawah (termasuk pada DIK karena mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5)

Pada bulan November, terdapat 2 (dua) Permintaan Informasi yang ditolak, karena Permintaan informasi terkait Data Proyek serta Layout Konstruksi Gedung MBU (informasi termasuk kategori informasi dikecualikan); serta Permintaan informasi mengenai data peserta diklat (termasuk pada DIK karena mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5)

# JANGKA WAKTU PENYELESAIAN



BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI		JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU		ALASAN PENOLAKAN
							JAM	MENIT	
Januari	116	Orang	116	115	1	0		30	Permintaan data alumni Pasis I, II, ETO dan ETR (3 Periode Diklat) termasuk DIK mengacu pada Pasal 17h UU KIP
Februari	141	Orang	141	141	0	0		20	-
Maret	150	Orang	150	150	0	0		20	-
April	136	Orang	136	134	2	0		20	Permintaan informasi mengenai data peserta kegiatan diklat (termasuk pada DIK karena mengacu pada UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5)
Mei	189	Orang	189	189	0	0		30	-
Juni	112	Orang	112	112	0	0		30	-
Juli	91	Orang	91	91	0	0		20	-
Agustus	71	Orang	71	71	0	0		20	-
September	80	Orang	80	80	0	0		20	-
Oktober	75	Orang	75	74	1	0		20	Permintaan informasi mengenai data peserta kegiatan workshop atau bimtek di BPPTD Mempawah (termasuk pada DIK karena mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5)
November	83	Orang	83	81	2	0		30	- Permintaan informasi terkait Data Proyek serta Layout Konstruksi Gedung MBU (informasi termasuk kategori informasi dikecualikan); '- Permintaan informasi mengenai data peserta diklat (termasuk pada DIK karena mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 1, 3 dan 5)
Desember	79	Orang	79	79	0	0		30	-



# TERIMA KASIH



<https://bpsdm.kemenuhub.go.id/ppid/>  
[sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id](mailto:sekretariat-bpsdmp@dephub.go.id)

Jl. Medan Merdeka Timur No.5, RT.2/RW.1  
Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110